

NEWS ANALYSIS | RETNA HANANI, SSOS, MPP
DEPARTEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDP



IST

Publik Tidak Mendapat Gambaran Jelas

TERKAIT rendahnya serapan anggaran Covi-19 di Jawa Tengah, secara umum, saya melihat ada dua hal. Pertama, berkaitan dengan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merespon situasi emergency. Selain Dinas Kesehatan yang memang menjadi garda depan penanganan Covid-19 saya melihat OPD (dinas-dinas) lain tidak memiliki kesiapan institusi untuk menghadapi situasi emergency.

Perencanaan OPD yang selama ini memang berlangsung dalam tahap-tahapan baku, membuat OPD kehilangan kemampuan untuk merencanakan program dan kebijakan yang merespon situasi emergency.

Yang kedua, saya menilai, berkaitan dengan aspek good governance terutama transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selain anggota DPRD dan kelompok swadaya masyarakat yang sudah se-

jak awal mengawal dana Covid-19, publik Jawa Tengah tidak pernah mendapatkan gambaran kebijakan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan oleh OPD dalam rangka mengatasi dampak Covid.

Bukan hanya dalam konteks penyaluran bansos untuk orang miskin yang sudah sejak lama mengalami masalah pada ketersediaan data, OPD lain misalnya seperti Pariwisata (disporapar) mestinya juga jeli memikirkan kebijakan proteksi apa yg bisa diberikan oleh pemprov untuk sektor Pariwisata sebagai salah satu sektor yg paling terdampak covid.

Situasi emergency seperti ini seharusnya bisa memaksa OPD untuk jeli melihat problem publik dan kreatif dalam melakukan intervensi kebijakan. Dua hal ter-

■ KE HALAMAN 7

Publik Tidak...

■ DARI HALAMAN 1

sebut bisa dilakukan kalau OPD secara aktif mengajak kelompok terdampak untuk berpartisipasi dalam perencanaan program dan turut serta mengawal akuntabilitas dan transparansi.

Saran saya, pertama, penetapan prioritas pada sektor kesehatan dan jaminan sosial yang

sudah berjalan dilanjutkan serta diperluas. Untuk jaminan sosial Pemprov harus proaktif melakukan pengumpulan data kelompok yang rentan miskin. Yaitu kelompok rentan yang saat ini belum jatuh miskin tapi karena masa pandemi yang lama mereka akan mudah jatuh miskin.

Kemudian yang kedua, se-

cara aktif mengajak asosiasi profesi untuk berpartisipasi dan mendapatkan masukan tentang program dan kebijakan apa yang dibutuhkan oleh kelompok terdampak misalnya sektor pariwisata.

Kemudian langkah selanjutnya bantuan sosial harus direncanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang berkelanjutan. Misalnya Operasi pembe-

rian sembako adalah kegiatan penting tetapi sangat parsial.

Pemprov bisa memikirkan misalnya program pelatihan keterampilan baru bagi kelompok terdampak, program jaminan kesehatan yang diperluas untuk pasien yang beresiko tinggi terkena Covid-19 (misalnya pasien cuci darah), dan jaminan sosial untuk manula. (tim)